



# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN**

**Jl. Ahmad Yani No. 23**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan tiap pimpinan Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Tahun 2025, Maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo membuat Laporan Kinerja. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Probolinggo, Pebruari 2026

**KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**SUGENG WIYANTO, S.Sos.,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690322 199703 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja setiap instansi pemerintah adalah kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis yang dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan *output* kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD). LKjPD dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setiap setahun sekali

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) adalah pengukuran kinerja, dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan lampiran-lampiran yang mendukung, antara lain Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun sebagai pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dilakukan pengukuran melalui instrumen indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan. Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, yaitu kinerja indikator



Persentase Pertumbuhan omzet koperasi yang Terselesaikan tercapai sebesar 96,5%, indikator kinerja Persentase Pertumbuhan omzet Usaha Mikro yang Terselesaikan tercapai sebesar 300,5% (Kenaikan terjadi karena Gerakan Bela dan Beli Produk UMKM di Kabupaten Probolinggo diatur melalui Instruksi Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 yang mewajibkan OPD membeli produk UMKM lokal untuk konsumsi rapat dan kebutuhan sehari-hari. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi lokal dan memfasilitasi UMKM naik kelas.) , Indikator kinerja Persentase Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan (data belum rilis di BPS), indikator kinerja Persentase Kontribusi PDRB sub sektor industri yang (data belum rilis di BPS),, dan indikator kinerja Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam melaksanakan kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian menyerap anggaran sebesar 98,58%.

Keempat Sasaran Strategis Tersebut Selanjutnya Diukur Dengan Mengimplementasikan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama. Secara Umum Pada Tahun 2025 Capaian Target Kinerja Yang Ditetapkan dapat Dilihat Pada Tabel Di Bawah Ini :

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian  
Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

| No. | Sasaran                                            | Indikator sasaran                                 | Kondisi Awal | Target Capaian |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|     |                                                    |                                                   | (n-2)        | (n)            | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) |               |
|     | Meningkatnya omzet koperasi                        | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi             | 7,53         | 8              | 8,5   | 9     | 9,5   | 10    | 10,5          |
|     | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | Persentase Pertumbuhan omzet Usaha Mikro          | 1,97         | 2              | 2,25  | 2,5   | 2,75  | 3     | 3,25          |
|     | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | 13           | 13,5           | 14    | 14,5  | 15    | 15,5  | 16            |
|     | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor industri    | 26,5         | 27             | 27,5  | 28    | 28,5  | 29    | 29,5          |
|     | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah     | 1,22         | 1              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             |



## DAFTAR ISI

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>KATAPENGANTAR.....</b>     | <b>i</b>   |
| <b>IKHTIAR EKSEKUTIF.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>       | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>      | <b>iv</b>  |

### **BAB I : PENDAHULUAN..... 1**

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Latar Belakang.....                                                           | 1 |
| 2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian..... | 2 |
| 3. Struktur Organisasi.....                                                      | 3 |
| 4. MetodePenyusunan.....                                                         | 4 |

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA..... 18**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.1 Rencana Strategis Perubahan 2025-2029 ..... | 18 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....     | 25 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama.....                | 28 |
| 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025.....             | 29 |
| 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....         | 30 |

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... 31**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 3.1 Akuntabilitas Kinerja.....                | 31 |
| 3.2 Pengukuran Kinerja.....                   | 32 |
| 3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja..... | 37 |
| 3.3.1 Sasaran Strategis Satu .....            | 37 |
| 3.3.2 Sasaran Strategis Dua.....              | 37 |
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan.....               | 39 |

### **BAB IV : PENUTUP .....47**

#### **DAFTAR TABEL**

|         |                           |    |
|---------|---------------------------|----|
| Tabel 1 | Jumlah Pegawai DKUPP..... | 11 |
|---------|---------------------------|----|



|          |                                                                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2  | Aset yang dimiliki DKUPP.....                                                                                  | 12 |
| Tabel 3  | Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....                                                       | 18 |
| Tabel 4  | Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.....                                                                          | 25 |
| Tabel 5  | Tujuan dan Sasaran Renstra DKUPP.....                                                                          | 30 |
| Tabel 6  | Indikator Kinerja Utama (IKU).....                                                                             | 31 |
| Tabel 7  | Sasaran Strategis Program dan Kegiatan.....                                                                    | 32 |
| Tabel 8  | Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....                                                                             | 33 |
| Tabel 9  | Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2025.....                                                              | 34 |
| Tabel 10 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....                                                      | 37 |
| Tabel 11 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Periode Renstra)..... | 39 |
| Tabel 12 | Penyebab Keberhasilan & Kegagalan Pencapaian Kinerja.....                                                      | 43 |
| Tabel 13 | Realisasi Anggaran.....                                                                                        | 48 |
| Tabel 14 | Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....                                                             | 51 |



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.. 10



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implemetasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Probolinggo serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

#### a. Struktur Organisasi

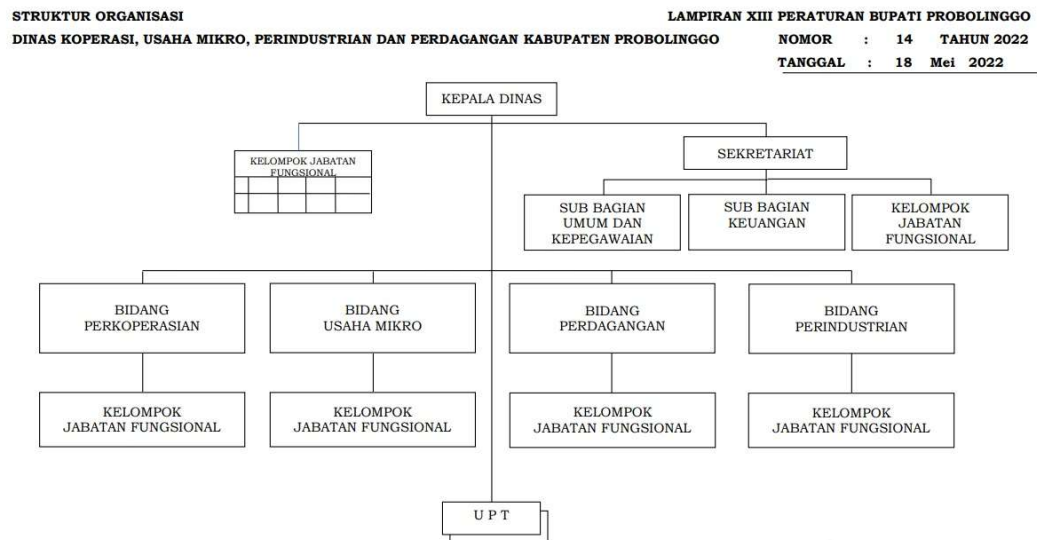
Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB V pasal 52 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang



berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo



1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian \*) Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
  - d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. . Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
  - e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
  - f. penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;



- d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan.. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan administrasi rencana program/ kegiatan/ anggaran/ data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/ kegiatan/ anggaran data serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris



3. Kepala Bidang Perkoperasian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perkoperasian. Kepala Bidang Perkoperasian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemeringkatan koperasi, izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang perkoperasian;
  - h. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis serta koordinasi pada bidang usaha mikro. Kepala Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
  - b. pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
  - d. pelaksanaan dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang usaha mikro;
  - g. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program di bidang perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program di bidang perdagangan;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha perdagangan;
  - d. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
  - f. pelaksanaan pengembangan ekspor nasional skala daerah meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
  - g. pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen;
  - h. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - i. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program di bidang perindustrian;



- b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten;
- d. pelaksanaan pengendalian dan supervisi dibidang izin usaha perindustrian;
- e. pelaksanaan penyediaan sistem informasi industri bagi pelaku industri;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 199

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- (4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;



- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

#### Pasal 200

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### U P T

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf h, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **a. Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**

Status kepegawaian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025, total pegawai sebanyak 234 terdiri atas :

- PNS : 109 orang
- PPPK : 6 Orang
- PPPK Paruh Waktu : 119 orang



Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan Struktural sebesar 5 orang, Jabatan Fungsional 10 orang dan sebagai staf sebesar 94 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Berdasarkan Jenis Kelamin :</b><br>- Laki-laki<br>- Perempuan<br>- Total                                                                                                                                                                   | 234                                               |
| 2.  | <b>Berdasarkan Status Kepegawaian :</b><br>- PNS<br>- PPPK<br>- PPPK Paruh Waktu<br>- Total                                                                                                                                                   | 109<br>6<br>119<br>234                            |
| 3.  | <b>Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :</b><br>- S2<br>- S1<br>- D3/DIV<br>- SMA/SMK<br>- SMP<br>- SD                                                                                                                                         | 14<br>76<br>1<br>77<br>9<br>3                     |
| 4.  | <b>Berdasarkan Jenjang Eselon :</b><br>- Eselon II<br>- Eselon III.b<br>- Eselon III.a<br>- Eselon IV/Pejabat Fungsional<br>- Staf/Non Eselon                                                                                                 | 1<br>2<br>1<br>17<br>95                           |
| 5.  | <b>Berdasarkan Pangkat/Golongan :</b><br>- Pembina Tingkat I<br>- Pembina<br>- Penata Tingkat I<br>- Penata<br>- Penata Muda Tingkat I<br>- Penata Muda<br>- Pengatur Tingkat I<br>- Pengatur<br>- Pengatur Muda Tingkat I<br>- Pengatur Muda | 2<br>1<br>24<br>20<br>4<br>6<br>44<br>7<br>-<br>2 |

Catatan :



**b. Sarana dan Prasarana/Aset Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**

| No. | Jenis Aset                                         | Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit) | Kondisi Baik (Unit) | Kondisi Rusak (Unit) |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1   | Portable Generating Set                            | 1                                            | 1                   |                      |
| 2   | Pompa Air                                          | 3                                            | 3                   |                      |
| 3   | Station Wagon                                      | 7                                            | 7                   |                      |
| 4   | Sport Utility Vehicle (SUV)                        | 1                                            | 1                   |                      |
| 5   | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )            | 2                                            | 2                   |                      |
| 6   | Truck + Attachment                                 | 1                                            | 1                   |                      |
| 7   | Pick Up                                            | 3                                            | 3                   |                      |
| 8   | Sepeda Motor                                       | 54                                           | 54                  |                      |
| 9   | Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | 7                                            | 7                   |                      |
| 10  | Gerobak Dorong                                     | 72                                           | 72                  |                      |
| 11  | Mesin Tenun Tekstil                                | 4                                            | 4                   |                      |
| 12  | Rol Meter                                          | 1                                            | 1                   |                      |
| 13  | Global Positioning System                          | 1                                            | 1                   |                      |
| 14  | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)                      | 1                                            | 1                   |                      |
| 15  | Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg                     | 6                                            | 6                   |                      |
| 16  | Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan                | 1                                            | 1                   |                      |
| 17  | Anak Timbangan Bidur                               | 150                                          | 150                 |                      |
| 18  | Anak Timbangan Dari Besi                           | 100                                          | 100                 |                      |
| 19  | Lain-lain Alat Penyimpanan                         | 1                                            | 1                   |                      |
| 20  | Lain-Lain Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian | 3                                            | 3                   |                      |
| 21  | Alat Penggiling Padi                               | 1                                            | 1                   |                      |
| 22  | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)          | 1                                            | 1                   |                      |
| 23  | Mesin Penghitung Uang                              | 2                                            | 2                   |                      |
| 24  | Lemari Besi/Metal                                  | 19                                           | 19                  |                      |
| 25  | Lemari Kayu                                        | 52                                           | 52                  |                      |
| 26  | Rak Besi                                           | 12                                           | 12                  |                      |
| 27  | Filing Cabinet Besi                                | 60                                           | 60                  |                      |
| 28  | Brandkas                                           | 4                                            | 4                   |                      |
| 29  | Kontainer                                          | 35                                           | 35                  |                      |
| 30  | Lemari Kaca                                        | 45                                           | 45                  |                      |
| 31  | CCTV - Camera Control Television System            | 5                                            | 5                   |                      |
| 32  | Papan Visual/Papan Nama                            | 4                                            | 4                   |                      |



|    |                                     |     |     |  |
|----|-------------------------------------|-----|-----|--|
| 33 | White Board                         | 1   | 1   |  |
| 34 | Alat Penghancur Kertas              | 10  | 10  |  |
| 35 | Mesin Absensi                       | 17  | 17  |  |
| 36 | Display                             | 21  | 21  |  |
| 37 | LCD Projector/Infocus               | 2   | 2   |  |
| 38 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 7   | 7   |  |
| 39 | Papan Nama Instansi                 | 6   | 6   |  |
| 40 | Papan Pengumuman                    | 6   | 6   |  |
| 41 | Papan Tulis                         | 2   | 2   |  |
| 42 | Meja Kerja Kayu                     | 90  | 90  |  |
| 43 | Kursi Kayu                          | 5   | 5   |  |
| 44 | Meja Rapat                          | 2   | 2   |  |
| 45 | Tempat Tidur Kayu                   | 3   | 3   |  |
| 46 | Meja Resepsionis                    | 2   | 2   |  |
| 47 | Meja Panjang                        | 2   | 2   |  |
| 48 | Meja 1/2 Biro                       | 56  | 56  |  |
| 49 | Kursi Rapat                         | 60  | 60  |  |
| 50 | Kursi Tamu                          | 16  | 16  |  |
| 51 | Kursi Putar                         | 7   | 7   |  |
| 52 | Kursi Biasa                         | 10  | 10  |  |
| 53 | Kursi Lipat                         | 142 | 142 |  |
| 54 | Sofa                                | 7   | 7   |  |
| 55 | Filling Besi/Metal                  | 23  | 23  |  |
| 56 | Rak Kayu                            | 4   | 4   |  |
| 57 | Tenda                               | 32  | 32  |  |
| 58 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2   | 2   |  |
| 59 | Mesin Pemotong Rumput               | 7   | 7   |  |
| 60 | Lemari Es                           | 2   | 2   |  |
| 61 | A.C. Window                         | 8   | 8   |  |
| 62 | A.C. Split                          | 25  | 25  |  |
| 63 | Kipas Angin                         | 1   | 1   |  |
| 64 | Exhaust Fan                         | 3   | 3   |  |
| 65 | Kompas Gas (Alat Dapur)             | 1   | 1   |  |
| 66 | Tabung Gas                          | 1   | 1   |  |
| 67 | Lain-lain Alat Dapur                | 6   | 6   |  |
| 68 | Televisi                            | 10  | 10  |  |
| 69 | Sound System                        | 10  | 10  |  |
| 70 | Wireless                            | 1   | 1   |  |
| 71 | Megaphone                           | 36  | 36  |  |
| 72 | Camera Video                        | 1   | 1   |  |
| 73 | Dispenser                           | 2   | 2   |  |
| 74 | Handy Cam                           | 1   | 1   |  |
| 75 | Karpet                              | 53  | 53  |  |
| 76 | Gordyn/Kray                         | 5   | 5   |  |



|     |                                                               |     |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 77  | Lampu                                                         | 16  | 16  |  |
| 78  | Handtruck Trolley Plastics                                    | 22  | 22  |  |
| 79  | Alat Pemadam/Portable                                         | 2   | 2   |  |
| 80  | Hidran Kebakaran                                              | 54  | 54  |  |
| 81  | Alat Pembantu Kebakaran                                       | 2   | 2   |  |
| 82  | Meja Kerja Pejabat Eselon II                                  | 5   | 5   |  |
| 83  | Meja Kerja Pejabat Eselon III                                 | 7   | 7   |  |
| 84  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                                  | 10  | 10  |  |
| 85  | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                                 | 5   | 5   |  |
| 86  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                                | 16  | 16  |  |
| 87  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                                 | 38  | 38  |  |
| 88  | Kursi Kerja                                                   | 100 | 100 |  |
| 89  | Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain                                 | 5   | 5   |  |
| 90  | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis                         | 1   | 1   |  |
| 91  | Professional Sound System                                     | 3   | 3   |  |
| 92  | Proyektor + Attachment                                        | 1   | 1   |  |
| 93  | Camera Electronic                                             | 10  | 10  |  |
| 94  | Slide Projector                                               | 2   | 2   |  |
| 95  | Lensa Kamera                                                  | 4   | 4   |  |
| 96  | Layar Film/Projector                                          | 11  | 11  |  |
| 97  | Camera Digital                                                | 1   | 1   |  |
| 98  | Telephone (PABX)                                              | 2   | 2   |  |
| 99  | Pesawat Telephone                                             | 19  | 19  |  |
| 100 | Handy Talky (HT)                                              | 12  | 12  |  |
| 101 | Facsimile                                                     | 2   | 2   |  |
| 102 | Tas Punggung Emergency                                        | 42  | 42  |  |
| 103 | Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) | 2   | 2   |  |
| 104 | Incubator (Alat Laboratorium Umum)                            | 2   | 2   |  |
| 105 | Filter Press                                                  | 1   | 1   |  |
| 106 | Mesin Packing Benang                                          | 1   | 1   |  |
| 107 | Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg                              | 9   | 9   |  |
| 108 | Anak Timbangan                                                | 23  | 23  |  |
| 109 | Lain-Lain Alat Laboratorium lain (Alat Tes HbA1C)             | 33  | 33  |  |
| 110 | Lain-Lain Unit Alat Laboratorium Lainnya                      | 2   | 2   |  |
| 111 | Thermometer Badan                                             | 1   | 1   |  |
| 112 | Barometer (Meteorological Equipment)                          | 1   | 1   |  |
| 113 | Lain-lain Alat Laboratorium Penunjang                         | 6   | 6   |  |
| 114 | Night Vision Goggles/Kaca Mata Malam                          | 1   | 1   |  |
| 115 | P.C Unit                                                      | 35  | 35  |  |
| 116 | Lap Top                                                       | 85  | 85  |  |
| 117 | Note Book                                                     | 46  | 46  |  |
| 118 | Scanner (Peralatan Mini Komputer)                             | 1   | 1   |  |
| 119 | Printer                                                       | 6   | 6   |  |
| 120 | CPU (Peralatan Personal Komputer)                             | 2   | 2   |  |



|        |                                       |      |      |   |
|--------|---------------------------------------|------|------|---|
| 121    | Monitor                               | 11   | 11   |   |
| 122    | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 95   | 95   |   |
| 123    | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3    | 3    |   |
| 124    | External/ Portable Hardisk            | 12   | 12   |   |
| 125    | Hardisk External                      | 8    | 8    |   |
| 126    | Server                                | 1    | 1    |   |
| 127    | Router                                | 1    | 1    |   |
| 128    | Kabel LAN PROLINK Cable Cat5e         | 1    | 1    |   |
| 129    | USB-C To USB-A HUB With Ethernet      | 2    | 2    |   |
| 130    | Tenda                                 | 77   | 77   |   |
| 131    | Lain-lain Rambu Tidak Bersuar         | 7    | 7    |   |
| Jumlah |                                       | 2234 | 2234 | 0 |

Sumberdata hasil rekon BMD

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

### b. Tujuan

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## 1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKj-PD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024. tentang akuntansi koperasi, laporan keuangan koperasi, dan audit laporan keuangan.
- j. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024: Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024: Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024: Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024: Mengatur tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya



- n. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perkembangan Industri
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.4.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

| No. | Masalah Pokok                                              | Rumusan Masalah                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro | Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro                            | 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro;<br>2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi dan Usaha Mikro.                                                                                                                         |
|     |                                                            | Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi dan Usaha Mikro | 1. Rendahnya aspek kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;<br>2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM;<br>3. Rendahnya akses informasi dan akurasi data perkoperasian dan Usaha mikro;<br>4. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi. |



|    |                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | Lemahnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Informasi layanan perbankan/ lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang memadai;</li> <li>2. Rendahnya kapabilitas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan.</li> </ol>                                                                                                                               |
|    |                                                                                            | Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi</li> <li>2. Produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standardisasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                            | Kurang optimalnya akses pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk</li> <li>2. Kurang optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah</li> </ol>                                                                                                                    |
| 2. | Kurangnya daya saing di sektor perdagangan dalam persaingan pembangunan ekonomi era global | Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ketergantungan terhadap produk impor;</li> <li>2. Kurang optimalnya Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan</li> <li>3. Fluktuasi harga barang pokok dan penting</li> <li>4. Kurangnya promosi dan Kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)</li> </ol> |
|    |                                                                                            | Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan tertib niaga berupa Penertiban Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan Barang dalam Keadaan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                |
| 3. | Kurangnya daya saing di sektor industri dalam persaingan pembangunan ekonomi era global    | Belum Optimalnya peranan industri kecil dan menengah dalam meningkatkan produktifitas dan penerapan Sistem Informasi Industri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Infrastruktur Pendukung Ekonomi sektor Industri;</li> <li>2. Belum Optimalnya Penerapan Pengendalian Izin Usaha Industri;</li> <li>3. Belum optimalnya struktur industry (huluantara-hilir);</li> </ol>                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                                                   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>4. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan data industry;</p> <p>5. Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo menghadapi permasalahan utama dibagi menjadi 4 (empat) isu strategis :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro melalui Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan produktivitas baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk, Peningkatan akses pemasaran baik secara online maupun offline serta Penguatan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan (swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah), Peningkatan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok;
3. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan tertib niaga berupa Penertiban Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus;
4. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara-hilir), Pengendalian Legalitas Usaha Industri, optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri serta penguatan sistem informasi dan data industri.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

##### a. Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Probolinggo dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**

| No  | Tujuan                                                                  | Sasaran                                            | Indikator Tujuan dan Sasaran                  | Kondisi Awal | Target Capaian |       |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|     |                                                                         |                                                    |                                               | (n-2)        | (n)            | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) |       |               |
| 1   | Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah |                                                    | Persentase PDRB Perdagangan                   | 4,11         | 4,67           | 5,23  | 5,78  | 6,34  | 6,9   | 7,46  |               |
|     |                                                                         |                                                    | Rasio PDRB Industri Pengolahan                | 27,19        | 27,35          | 27,43 | 27,44 | 27,45 | 27,47 | 27,48 |               |
| 1.1 |                                                                         | Meningkatnya omzet koperasi                        | % Pertumbuhan omzet koperasi                  | 7,53         | 8              | 8,5   | 9     | 9,5   | 10    | 10,5  |               |
| 1.2 |                                                                         | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | % Pertumbuhan omzet Usaha Mikro               | 1,97         | 2              | 2,25  | 2,5   | 2,75  | 3     | 3,25  |               |
| 1.3 |                                                                         | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | % Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan      | 13           | 13,5           | 14    | 14,5  | 15    | 15,5  | 16    |               |
| 1.4 |                                                                         | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | % Kontribusi PDRB sub sektor industri         | 26,5         | 27             | 27,5  | 28    | 28,5  | 29    | 29,5  |               |
| 2   |                                                                         | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 1,22         | 1              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |               |



**Gambar 2.1 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo**

|                       |                                                                                                                                                               |                                                       |                                              |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| RPD                   | RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026                                                                                                                    |                                                       |                                              |                                          |
| TUJUAN                | Meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif berbasis sector potensial yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan |                                                       |                                              |                                          |
| INDIKATOR TUJUAN      | Pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                           |                                                       |                                              |                                          |
| SASARAN               | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi berbasis Sektor Unggulan                                                                                                     |                                                       |                                              |                                          |
| INDIKATOR SASARAN     | Pertumbuhan sub sektor industri dan perdagangan                                                                                                               | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi dan Usaha Mikro |                                              |                                          |
| OPD                   | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                                                                                    |                                                       |                                              |                                          |
| TUJUAN OPD            | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan Kab Probolinggo                                                                                       |                                                       |                                              |                                          |
| INDIKATOR OPD         | Pertumbuhan sub sektor industri                                                                                                                               | Pertumbuhan sub sektor perdagangan                    | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi dan UM |                                          |
| SASARAN OPD           | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri                                                                                                                         |                                                       | Meningkatnya omzet koperasi                  |                                          |
|                       | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan                                                                                                                      |                                                       | Meningkatnya omzet Usaha Mikro               |                                          |
| INDIKATOR SASARAN OPD | Kontribusi PDRB sub sektor industri                                                                                                                           | Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan                | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi        | Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro |

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah yang dijabarkan melalui tabel 2.1. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| <b>Tujuan</b>                                                              | <b>Sasaran</b>                                | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan Kab Probolinggo | 1.1. Meningkatnya omzet koperasi              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pendidikan dan pelatihan baik berbasis system offline maupun online</li> <li>➤ Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>➤ Meningkatkan jumlah Koperasi dan Usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan</li> <li>➤ Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi dan Usaha mikro</li> <li>➤ Meningkatkan omzet Koperasi dan Usaha mikro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan usaha mikro</li> <li>○ Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan Usaha mikro</li> <li>○ Peningkatan fasilitasi kepada Koperasi dan Usaha mikro dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan</li> <li>○ Penguatan manajemu usaha Koperasi dan usaha mikro melalui pemberdayaan, pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi;</li> <li>○ Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk Koperasi dan Usaha mikro</li> </ul> |
|                                                                            | 1.2. Meningkatnya omzet usaha mikro           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | 1.3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>➤ Meningkatkan standarisasi dan perlindungan Konsumen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peningkatan ekspor komoditi potensial, stabilisasi harga bahan pokok , sarana distribusi perdagangan serta pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                            |                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan tertib niaga melalui Penertiban alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan terbungkus</li> </ul>                                                                 |
|  | 1.4. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan peranan industri kecil dan menengah dalam peningkatan produktivitas</li> <li>➢ Peningkatan penerapan teknologi industri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan infrastruktur pendukung sektor industry Optimalisasi struktur industri dan perdagangan</li> <li>o Optimalisasi Pengendalian Izin usaha sektor industry Dan Penerapan system informasi industri</li> </ul> |

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdiri dari Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai dengan keputusan Kepala PD tentang IKU PD.

### Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024

| Sasaran Strategis / Kinerja Utama                   | Indikator Kinerja Utama                  | Penjelasan / Formulasi Perhitungan                                                                                            | Penanggung Jawab     | Sumber Data           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP PD          | $\frac{\text{Nilai sakiptahun } n}{\text{Nilai sakiptahun } n-1} \times 100$                                                  | Sekretariat          | LHE AKIP PD           |
| Meningkatnya omzet koperasi                         | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi    | $\frac{\text{Omzet Koperasi tahun N} - \text{Omzet Koperasi tahun N-1}}{\text{Omzet Koperasi tahun N-1}} \times 100$          | Bidang Perkoperasian | ODS Koperasi          |
| Meningkatnya omzet Usaha Mikro                      | Persentase pertumbuhan omzet Usaha Mikro | $\frac{\text{Omzet Usaha Mikro tahun N} - \text{Omzet Usaha Mikro tahun N-1}}{\text{Omzet Usaha Mikro tahun N-1}} \times 100$ | Bidang Usaha Mikro   | Data Base Usaha Mikro |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan            | Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan   | $\frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100$                                       | Bidang Perdagangan   | BPS                   |
| Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri               | Kontribusi PDRB sub sektor industri      | $\frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100$                                          | Bidang Perindustrian | BPS                   |



### 2.3. Sasaran Strategis, Program, Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

| Sasaran Strategis              | Program                                                                  | Kegiatan                                                                                                                                             | Sub Kegiatan |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Meningkatnya omzet koperasi    | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            |              |
|                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota     |              |
|                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota              |              |
|                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                              |              |
|                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               |              |
| Meningkatnya omzet Usaha Mikro | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku |              |



|                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                 |                                                                     | Kepentingan                                                                                                                                         |  |
|                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                           | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                               |  |
| <b>Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan</b> | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                          |  |
|                                                 |                                                                     | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                      |  |
|                                                 |                                                                     | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)                 |  |
|                                                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                           |  |
|                                                 |                                                                     | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                           |  |
|                                                 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                              |  |
|                                                 |                                                                     | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |  |
|                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |
|                                                 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                |  |

|                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           | PROGRAM<br>PENGUNAAN DAN<br>PEMASARAN<br>PRODUK DALAM<br>NEGERI            | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan<br>Peningkatan<br>Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri                                                                                                                         |  |
| <b>Meningkatnya<br/>PDRB Sub Sektor<br/>Industri</b>                      | PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI                      | Penyusunan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |  |
|                                                                           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN IZIN<br>USAHA INDUSTRI                             | Penerbitan Izin Usaha<br>Industri (IUI), Izin<br>Perluasan Usaha<br>Industri (IPUI), Izin<br>Usaha Kawasan<br>Industri<br>(IUKI) dan Izin<br>Perluasan Kawasan<br>Industri (IPKI)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |  |
|                                                                           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM INFORMASI<br>INDUSTRI NASIONAL            | Penyediaan Informasi<br>Industri untuk<br>Informasi Industri<br>untuk IUI,<br>IPUI, IUKI dan IPKI<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                 |  |
| <b>Meningkatkan<br/>Tatakelola<br/>Birokrasi<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                         |  |
|                                                                           |                                                                            | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                           |                                                                            | Administrasi Barang<br>Milik Daerah<br>pada Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                   |  |
|                                                                           |                                                                            | Administrasi<br>Pendapatan Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                               |  |
|                                                                           |                                                                            | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                           |                                                                            | Administrasi Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                           |                                                                            | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                      |  |
|                                                                           |                                                                            | Penyediaan Jasa<br>Penunjang                                                                                                                                                                                      |  |



|  |  |                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Urusan Pemerintahan Daerah                                            |  |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |

#### 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran.

| No | Sasaran Kinerja                                    | Indikator Kinerja Sasaran                         | Satuan | Target Tahunan | Target Tribulanan |       |        |       |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-------|--------|-------|
|    |                                                    |                                                   |        |                | TW I              | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah     | %      | 1              | 1                 |       |        |       |
| 2. | Meningkatnya omzet koperasi                        | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi             | %      | 8              | 2                 | 2     | 2      | 2     |
| 3. | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | Persentase Pertumbuhan omzet Usaha Mikro          | %      | 2              |                   | 1     |        | 1     |
| 4. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | %      | 13,5           |                   | 10    |        | 3,5   |
| 5. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor industri    | %      | 26,50          |                   | 20    |        | 6,50  |

#### 2.5. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Berisi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (akad atau janji antara penerima amanah (Kepala PD) dengan pemberi amanah (Bupati Probolinggo) untuk mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.



**PROGRAM DAN ANGGARAN  
APBD TAHUN 2025**

| No | Sasaran Kinerja                                    | Indikator Kinerja Sasaran                         | Satuan | Target Tahunan |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah     | %      | 1              |
| 2. | Meningkatnya omzet koperasi                        | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi             | %      | 8              |
| 3. | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | Persentase Pertumbuhan omzet Usaha Mikro          | %      | 2              |
| 4. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | %      | 13,5           |
| 5. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor industri    | %      | 26,50          |

| NO. | PROGRAM                                                                  | ANGGARAN           | KETERANGAN (SUMBER DANA)     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Rp. 17.564.986.512 | DAU, SILPA, PAD, DBH, PBHPKB |
| 2.  | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                              | Rp. 49.007.500     | SILPA                        |
| 3.  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | Rp. 16.604.000     | SILPA                        |
| 4.  | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Rp. 770.330.750    | SILPA, PAD, DID FISKAL       |
| 5.  | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Rp. 69.631.750     | SILPA                        |
| 6.  | program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | Rp. 70.900.000     | DID FISKAL, DAU              |
| 7.  | Program Pengembangan UMKM                                                | Rp. 120.000.000    | DAU, SILPA                   |
| 8.  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             | Rp. 5.044.200      | SILPA                        |
| 9.  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Rp. 1.104.962.000  | DAU, PAD, SILPA              |
| 10. | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting      | Rp. 955.232.800    | DID FISKAL, SILPA            |
| 11. | Program pengembangan ekspor                                              | Rp. 13.484.960     | SILPA                        |



| NO. | PROGRAM                                                | ANGGARAN                  | KETERANGAN<br>(SUMBER DANA) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 12. | Program standardisasi dan perlindungan konsumen        | Rp. 112.092.000           | SILPA                       |
| 13. | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri   | Rp. 259.089.000           | DAU, SILPA                  |
| 14. | Program perencanaan dan pembangunan industri           | Rp. 8.132.164.690         | DBHCHT                      |
| 15. | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional | Rp. 7.400.000             | SILPA                       |
|     | <b>Total</b>                                           | <b>Rp. 29.250.930.162</b> |                             |

### BAB. III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran capaian atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo tahun 2025. Sedangkan capaian indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Lebih dari 100                   | Sangat Baik                          |
| 2. | 75 – 100 %                       | Baik                                 |



|    |           |        |
|----|-----------|--------|
| 3. | 50 – 74 % | Cukup  |
| 4. | ≤ 50 %    | Kurang |

Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja  
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo digunakan untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

| No  | Sasaran                                            | Indikator Kinerja Sasaran                         | Target Tahun 2025 | Realisasi | Capaian (%) | Predikat           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1.  | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah     | 1                 | 0,98      | 98          | Baik               |
| 2.  | Meningkatnya omzet koperasi                        | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi             | 8                 | 7,72      | 96,5        | Baik               |
| 3.  | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | Persentase Pertumbuhan omzet Usaha Mikro          | 2                 | 6,01      | 300,5       | Sangat Baik        |
| 4.. | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | 13,5              | 0         | 0           | Menunggu Rilis BPS |
| 5.  | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | Persentase Kontribusi PDRB sub sektor industri    | 26,50             | 0         | 0           | Menunggu Rilis BPS |

Catatan : Kenaikan terjadi karena Gerakan Bela dan Beli Produk UMKM di Kabupaten Probolinggo diatur melalui Instruksi Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 yang



mewajibkan OPD membeli produk UMKM lokal untuk konsumsi rapat dan kebutuhan sehari-hari. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi lokal dan memfasilitasi UMKM naik kelas.

Terdiri dari:

- a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

|   | Sasaran                                            | Indikator Kinerja                               | Satuan     | Target Th 2025 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja (%) |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | 1 Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | Persentase | 1              | 0,98              | 98                  |
| 2 | Meningkatnya omzet koperasi                        | 2 % Pertumbuhan omzet koperasi                  | Persentase | 8              | 7,72              | 96,5                |
| 3 | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | 3 % Pertumbuhan omzet Usaha Mikro               | Persentase | 2              | 6,01              | 300,5               |
| 4 | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | 4 % Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan      | Persentase | 13,5           | 0                 | 0                   |
| 5 | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | 5 % Kontribusi PDRB sub sektor industri         | Persentase | 26,50          | 0                 | 0                   |

- b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.

| No  | Tujuan | Sasaran                                            | Indikator Tujuan dan Sasaran                  | Kondisi Awal | Realisasi |      |      |      |      | Capaian 2025 Terhadap Target 2026 |
|-----|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|-----------------------------------|
|     |        |                                                    |                                               | 2024         | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                   |
| 1.1 |        | Meningkatnya omzet koperasi                        | % Pertumbuhan omzet koperasi                  | 20,23        | 7,72      |      |      |      |      | 96,5                              |
| 1.2 |        | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                     | % Pertumbuhan omzet Usaha Mikro               | 1,97         | 6,01      |      |      |      |      | 300,5                             |
| 1.3 |        | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan           | % Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan      | 13,18        | 13,18     |      |      |      |      | 0                                 |
| 1.4 |        | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri              | % Kontribusi PDRB sub sektor industri         | 26,60        | 26,60     |      |      |      |      | 0                                 |
| 2   |        | Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah | 1,22         | 0,98      |      |      |      |      | 98                                |



(Analisa Tabel)

## c. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Berisi penjelasan identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

| No | Keberhasilan                                                        | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                                   | Kegagalan | Kendala dan Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alternatif solusi/ Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah | Meningkatnya pertumbuhan IKM di Kabupaten Probolinggo                                           |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Semakin berkurangnya IKM rokok lokal dengan adanya Permenperin Nomor : 64/M-IND/Per/7/2014, ttg Pengawasan dan engendalian Usaha Industri Rokok dimana disebutkan pada pasal 4 ayat 3 Perusahaan Industri Rokok harus memenuhi <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan</li> <li>Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum</li> </ul> </li> <li>Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.</li> <li>Masih rendahnya Industri Kecil dan Menengah yang memiliki Izin Usaha Industri guna menciptakan Iklim Usaha yang tertib karena status legalitas perusahaan sudah lengkap.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau beserta sarana &amp; prasarana pendukungnya untuk mendorong penumbuhan IKM Rokok yang telah mati suri.</li> <li>Peningkatan Kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk Industri Kecil &amp; Menengah melalui pelatihan serta sertifikasi kemampuan dan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.</li> <li>Mensosialisasikan kepada Industri Kecil da Menengah mengenai Izin Usaha Industri baik berupa Prosedur Pengurusan maupun manfaat perizinan bagi pemilik usaha dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait khususnya DPMPSTP selaku penerbit izin.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</li> </ul> </li> <li>Program Pengendalian Izin Usaha Industri <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Peningkatan Kinerja Perdagangan Daerah                              | Meningkatnya transaksi di sektor perdagangan berdasarkan hasil survey BPS Kabupaten Probolinggo |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya fasilitasi kemitraan dan pemasaran produk unggulan.</li> <li>Belum Optimalnya Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat baik Manajemen Penataan Pedagang maupun sarana dan prasarananya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah yang lebih mudah diakses oleh konsumen seperti Menjalin kerjasama dengan Lembaga Masyarakat yg bergerak di bidang Pemberdayaan UMKM dan memfasilitasi produk unggulan agar dapatnya bisa bermitra dengan Toko Modern, Retail, Perhotelan dll.</li> <li>Menyusun Perumusan Kebijakan yang dapat dituangkan melalui Perda atau Perbup mengenai Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</li> </ul> </li> <li>Program Pengembangan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</li> </ul> </li> <li>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</li> </ul> </li> </ul> |



|   |                                                |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Peningkatan volume usaha mikro                 | Semakin bertambahnya wirausaha pemula baru di Kabupaten Probolinggo                                                                      |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya Pengetahuan Manajemen Keuangan Usaha Mikro sehingga sangat sulit mengetahui omzet penjualan yang dihasilkan.</li> </ol>                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Pembinaan mengenai pengelolaan manajemen keuangan</li> <li>2. Memfasilitasi Pengembangan Usaha berupa akses pemasaran baik kemitraan maupun Penyelenggaraan Event Produk Usaha Mikro.</li> </ol>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</li> </ul> </li> <li>◆ Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Peningkatan Status Kesehatan Koperasi          | Meningkatnya Koperasi yang berpredikat sehat dan cukup sehat                                                                             |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Peraturan Perkoperasian yang dinamis</li> <li>2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik yang berakibat menurunnya jumlah koperasi aktif yang ber-RAT</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Sosialisasi mengenai Peraturan Perkoperasian terbaru</li> <li>2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya.</li> </ol>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>◆ Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ul> </li> <li>◆ Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ul> </li> <li>◆ Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ul> </li> <li>◆ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul> |
| 5 | Meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga | Adanya peningkatan pendapatan rumah tangga, ekonomi yang stabil dan Inflasi yang terkendali dapat membantu mencegah penurunan daya beli. |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenaikan harga barang dapat menyebabkan tekanan pada anggaran konsumsi rumah tangga</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertimbangkan regulasi yang ketat dan pengawasan terhadap harga dan persediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk mencegah praktik harga yang tidak wajar dan menjaga stabilitas harga di pasar</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.2. Realisasi Anggaran

Berisi anggaran yang direncanakan (RKA/ DPA) dan realisasinya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Tabel 3.2.  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

| No.       | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                              | Alokasi Biaya         |                 |       | Sumber<br>Dana                          | Output/Keluaran                                                                                                                                                                                      |        |           |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
|           |                                                                                                                   | Anggaran<br>(Rp.)     | Realisasi (Rp.) | %     |                                         | Uraian                                                                                                                                                                                               | Target | Realisasi | %     |
| <b>A</b>  | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                           | 17.564.986.512<br>,00 | 16.822.283.051  | 95,77 | <b>DAU,<br/>PAD,<br/>DBH,<br/>SILPA</b> | nilai sakip PD                                                                                                                                                                                       | 75     | 75,00     | 95,77 |
| <b>1.</b> | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             | 207.951.400,00        | 132.629.350     | 63,78 | <b>DAU</b>                              | Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>yang disusun dan<br>dilaporkan tepat<br>waktu                                                                              | 20     | 17,00     | 63,78 |
| 1.1       | Sub kegiatan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | 197.650.000,00        | 122.729.000     | 62,09 | <b>DAU</b>                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 9      | 8,00      | 62,09 |
| 1.2       | Sub kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 10.301.400,00         | 9.900.350       | 96,11 | <b>SILPA</b>                            | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 11     | 8,00      | 96,11 |
| <b>2</b>  | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                             | 13.690.800.430<br>,00 | 13.195.476.021  | 96,38 | <b>DAU</b>                              | Jumlah dokumen<br>administrasi<br>keuangan PD yang<br>dilaporkan<br>tepat waktu                                                                                                                      | 19     | 19,00     | 96,38 |
| 2.1       | Sub kegiatan<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | 13.684.481.030<br>,00 | 13.189.477.221  | 96,38 | <b>DAU</b>                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                              | 120    | 120,00    | 96,38 |
| 2.2       | Sub kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | 6.319.400,00          | 5.998.800       | 94,93 | <b>DAU</b>                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                              | 19     | 19,00     | 94,93 |
|           | Kegiatan Administrasi<br>Barang Milik Daerah                                                                      | 4.106.000,00          | 3.241.035       | 78,93 | <b>DAU</b>                              | Jumlah dokumen<br>administrasi<br>Pengelolaan BMD<br>pada PD yang                                                                                                                                    | 4      | 4,00      | 78,93 |



|  |                                                                                |                  |               |       |     |                                                                                        |     |        |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
|  | pada Perangkat Daerah                                                          |                  |               |       |     | disusun dan dilaporkan tepat waktu                                                     |     |        |       |
|  | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 4.106.000,00     | 3.241.035     | 78,93 | DAU | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 4   | 4,00   | 78,93 |
|  | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah            | 155.030.800,00   | 148.145.545   | 95,56 | DAU | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu              | 21  | 28,00  | 95,56 |
|  | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            | 155.030.800,00   | 148.145.545   | 95,56 | DAU | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                            | 19  | 19,00  | 95,56 |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 91.028.250,00    | 90.340.626    | 99,24 | DAU | Prosentase pemenuhan administrasi umum PD                                              | 100 | 100,00 | 99,24 |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 91.028.250,00    | 90.340.626    | 99,24 | DAU | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12  | 12,00  | 99,24 |
|  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 192.279.100,00   | 185.684.622   | 96,57 | DAU | Prosentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD                                      | 50  | 50,00  | 96,57 |
|  | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | 192.279.100,00   | 185.684.622   | 96,57 | DAU | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 40  | 40,00  | 96,57 |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 3.069.724.532,00 | 2.913.830.602 | 94,92 | DAU | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD                                  | 12  | 12,00  | 94,92 |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | 114.518.193,00   | 113.328.391   | 98,96 | DAU | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12  | 12,00  | 98,96 |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | 3.885.000,00     | 3.120.000     | 80,31 | DAU | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12  | 12,00  | 80,31 |
|  | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | 2.951.321.339,00 | 2.797.382.211 | 94,78 | DAU | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12  | 12,00  | 94,78 |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 154.066.000,00   | 152.935.250   | 99,27 | DAU | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik     | 150 | 120,00 | 99,27 |

|  |                                                                                                                                                                              |                |             |       |     |                                                                                                        |    |       |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
|  | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | 117.826.000,00 | 117.241.900 | 99,50 | DAU | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 | 40,00 | 99,50 |
|  | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | 20.300.000,00  | 20.285.000  | 99,93 | DAU | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 | 40,00 | 99,93 |
|  | Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             | 15.940.000,00  | 15.408.350  | 96,66 | DAU | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1  | 1,00  | 96,66 |
|  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                  | 49.007.500,00  | 45.649.384  | 93,15 | DAU | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan                                   | 82 | 80,00 | 93,15 |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 49.007.500,00  | 45.649.384  | 93,15 | DAU | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan                                   | 82 | 80,00 | 93,15 |
|  | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                      | 18.203.000,00  | 15.531.217  | 85,32 | DAU | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                              | 40 | 40,00 | 85,32 |
|  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                        | 30.804.500,00  | 30.118.167  | 97,77 | DAU | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                        | 30 | 25,00 | 97,77 |
|  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                 | 16.604.000,00  | 9.469.950   | 57,03 | DAU | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya                                                 | 92 | 92,00 | 57,03 |
|  | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                             | 16.604.000,00  | 9.469.950   | 57,03 | DAU | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya                                             | 82 | 80,00 | 57,03 |
|  | Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja                                                                                       | 16.604.000,00  | 9.469.950   | 57,03 | DAU | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                     | 30 | 30,00 | 57,03 |



|  |                                                                                                                                                                           |                |             |       |     |                                                                                                                                                                     |     |        |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
|  | Kuangan, dan Permodalan                                                                                                                                                   |                |             |       |     |                                                                                                                                                                     |     |        |       |
|  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                              | 770.330.750,00 | 755.478.497 | 98,07 | DAU | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya                                                                                                        | 75  | 70,00  | 98,07 |
|  | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 770.330.750,00 | 755.478.497 | 98,07 | DAU | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan                                                                                              | 25  | 25,00  | 98,07 |
|  | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                              | 770.330.750,00 | 755.478.497 | 98,07 | DAU | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                  | 240 | 240,00 | 98,07 |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                            | 69.631.750,00  | 61.148.094  | 87,82 | DAU | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya                                                                                                                  | 25  | 10,00  | 87,82 |
|  | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 69.631.750,00  | 61.148.094  | 87,82 | DAU | jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi                                                                                                                    | 35  | 35,00  | 87,82 |
|  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 69.631.750,00  | 61.148.094  | 87,82 | DAU |                                                                                                                                                                     | 30  | 28,00  | 87,82 |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                  | 70.900.000,00  | 69.562.195  | 98,11 | DAU | Persentase UM yang meningkat omzetnya                                                                                                                               | 5   | 4,00   | 98,11 |
|  | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 70.900.000,00  | 69.562.195  | 98,11 | DAU | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 600 | 600,00 | 98,11 |
|  | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                   | 40.000.000,00  | 39.302.610  | 98,26 | DAU | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                     | 110 | 110,00 | 98,26 |

|  |                                                                                                  |                |             |       |     |                                                                                                                                       |       |          |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
|  | Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                           | 20.000.000,00  | 19.380.400  | 96,90 | DAU | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                   | 8.300 | 8.300,00 | 96,90 |
|  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                       | 10.900.000,00  | 10.879.185  | -     | DAU | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 100   | 100,00   | -     |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                        | 120.000.000,00 | 114.108.000 | 95,09 | DAU | Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                 | 0,1   | 0,10     | 95,09 |
|  | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil   | 120.000.000,00 | 114.108.000 | 95,09 | DAU | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil                                                                     | 2     | 2,00     | 95,09 |
|  | Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 120.000.000,00 | 114.108.000 | 95,09 | DAU | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 70    | 70,00    | 95,09 |



| No.       | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                               | Alokasi Biaya     |                 |       | Sumber Dana | Output/Keluaran                                                                                |                  |                  |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|           |                                                                                                    | Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi (Rp.) | %     |             | Uraian                                                                                         | Target           | Realisasi        | %            |
| <b>A</b>  | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>                                                      |                   |                 |       | <b>PAD</b>  | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                                          | <b>20%</b>       | <b>19%</b>       | <b>96,55</b> |
| <b>1.</b> | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                       | 5.044.200,00      | 4.328.000       | 85,80 | <b>PAD</b>  | Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan                                               | 20 persentase    | 20 persentase    | 85,80        |
| 1.1       | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                            | 5.044.200,00      | 4.328.000       | 85,80 | <b>PAD</b>  | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                      | 5 Unit Usaha     | 5 Unit Usaha     | 85,80        |
| 1.2       | Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                             | 5.044.200,00      | 4.328.000       | 85,80 | <b>PAD</b>  | Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI                                   | 5 Dokumen        | 5 Dokumen        | 85,80        |
|           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  | 1.104.962.000,00  | 597.923.339     | 54,11 | <b>PAD</b>  | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi                                       | 5.71 persentase  | 5.71 persentase  | 54,11        |
|           | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | 1.027.075.000,00  | 521.514.952     | 50,78 | <b>PAD</b>  | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                    | 5 Unit           | 5 Unit           | 50,78        |
|           | Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                  | 1.027.075.000,00  | 521.514.952     | 50,78 | <b>PAD</b>  | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan    | 35 Unit          | 35 Unit          | 50,78        |
|           | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 77.887.000,00     | 76.408.387      | 98,10 | <b>PAD</b>  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 35 pengelola     | 35 pengelola     | 98,10        |
|           | Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                     | 77.887.000,00     | 76.408.387      | 98,10 | <b>PAD</b>  | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil                      | 35 Dokumen       | 35 Dokumen       | 98,10        |
|           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                | 955.232.800,00    | 948.159.465     | 99,26 | <b>PAD</b>  | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan                             | 61.11 persentase | 61.11 persentase | 99,26        |
|           | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok                                                              | 939.983.300,00    | 934.945.634     | 99,46 | <b>PAD</b>  | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok                                | 11 komoditas     | 11 komoditas     | 99,46        |



|  |                                                                                                                                                              |                |             |       |               |                                                                                                                 |                  |                  |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|  | Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                                                    |                |             |       |               | dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                       |                  |                  |       |
|  | Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan      | 11.326.300,00  | 9.316.270   | 82,25 | <b>PAD</b>    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  | 365 Laporan      | 365 Laporan      | 82,25 |
|  | Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                 | 928.657.000,00 | 925.629.364 | 99,67 | <b>Fiskal</b> | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan                                              | 5 Laporan        | 5 Laporan        | 99,67 |
|  | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 15.249.500,00  | 13.213.831  | 86,65 | <b>PAD</b>    | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 72 kali          | 50 kali          | 86,65 |
|  | Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                              | 15.249.500,00  | 13.213.831  | 86,65 | <b>PAD</b>    | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah                                | 72 Laporan       | 50 Laporan       | 86,65 |
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                  | 13.484.960,00  | 11.802.300  | 87,52 | <b>PAD</b>    | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi                                                  | 83.33 persentase | 83.33 persentase | 87,52 |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13.484.960,00  | 11.802.300  | 87,52 | <b>PAD</b>    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                      | 30 produk        | 30 produk        | 87,52 |
|  | Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional                                                                                                                         | 5.265.500,00   | 4.825.050   | 91,64 | <b>PAD</b>    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                  | 5 Pelaku Usaha   | 5 Pelaku Usaha   | 91,64 |



|  |                                                                                                 |                |             |       |            |                                                                                                                                      |                  |                  |       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|  | Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                                            | 8.219.460,00   | 6.977.250   | 84,89 | <b>PAD</b> | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku                             | 15 Pelaku Usaha  | 15 Pelaku Usaha  | 84,89 |
|  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                 | 112.092.000,00 | 108.226.028 | 96,55 | <b>PAD</b> | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang                                                                                           | 95 persentase    | 95 persentase    | 96,55 |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                   | 112.092.000,00 | 108.226.028 | 96,55 | <b>DAU</b> | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                       | 50%              | 50%              | 96,55 |
|  | Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                               | 86.592.000,00  | 86.026.028  | 99,35 | <b>DAU</b> | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                            | 10600 Unit       | 10600 Unit       | 99,35 |
|  | Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              | 25.500.000,00  | 22.200.000  | 87,06 | <b>DAU</b> | Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri                                                      | 2050 Orang       | 2050 Orang       | 87,06 |
|  | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                            | 259.089.000,00 | 258.113.355 | 99,62 | <b>DAU</b> | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi                                                                              | 83.33 persentase | 83.33 persentase | 99,62 |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri          | 259.089.000,00 | 258.113.355 | 99,62 | <b>DAU</b> | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 30 UMKM          | 30 UMKM          | 99,62 |
|  | Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 259.089.000,00 | 258.113.355 | 99,62 | <b>DAU</b> | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 30 UMKM          | 30 UMKM          | 99,62 |

| No.      | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Alokasi Biaya  |                 |   | Sumber Dana   | Output/Keluaran                                            |            |            |   |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---|
|          |                                      | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |               | Uraian                                                     | Target     | Realisasi  | % |
| <b>A</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>           |                |                 |   | <b>DBCH T</b> | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah | <b>50%</b> | <b>35%</b> |   |



|     |                                                                                                                                |                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|     | <b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                                                                                    |                  |               |       |        | disahkan sebagai kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |       |
| 1.  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                   | 8.132.164.690,00 | 1.395.038.276 | 74,98 | DBCH T | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 persen     | 30 persen     | 74,98 |
| 1.1 | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                   | 8.132.164.690,00 | 1.395.038.276 | 74,98 | DBCH T | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50%           | 30%           | 74,98 |
| 1.2 | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1.860.961.540,00 | 31.974.796    | 51,04 | DBCH T | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 51,04 |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr                                             | 170.000.000,00   | 1.057.000     | 86,43 | DBCH T | Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     | 86,43 |
|     | Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                         | 6.101.203.150,00 | 1.362.006.480 | 96,60 | DBCH T | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan ijinnya                                                                                                                                                                                                                                   | 20 persentase | 20 persentase | 96,60 |
|     | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                         | 7.400.000,00     | 6.760.778     | 96,60 | DBCH T | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang | 50 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 96,60 |

|  |                                                                                                                                                            |              |           |       |                   |                                                                                                   |               |               |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|  |                                                                                                                                                            |              |           |       |                   | menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                               |               |               |       |
|  | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 7.400.000,00 | 6.760.778 | 96,60 | <b>DBCH<br/>T</b> | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas      | 50 Dokumen    | 50 Dokumen    | 96,60 |
|  | Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 7.400.000,00 | 6.760.778 | 75,27 | <b>DBCH<br/>T</b> | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS | 25 persentase | 25 persentase | 75,27 |



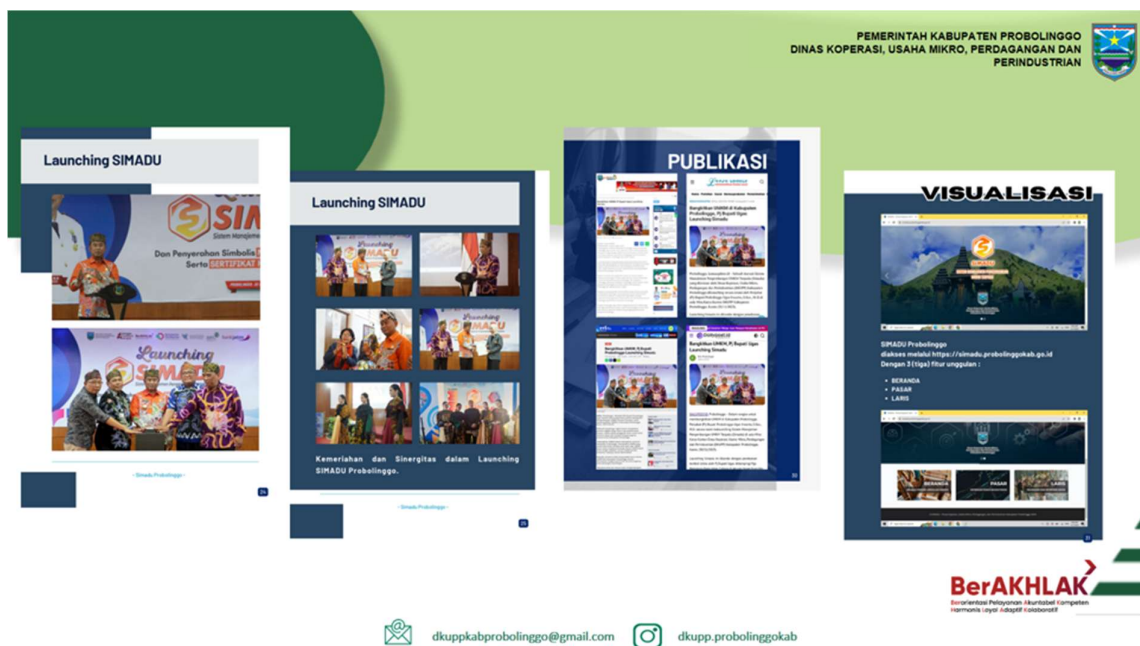
### 3.3. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

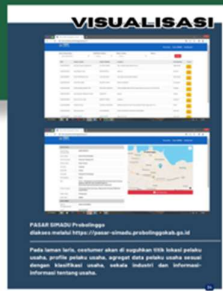
| NO | SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA                        | KINERJA |           |              | ANGGARAN      |               |              | TINGKAT EFISIENSI |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
|    |                                          |                                          | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN (%)  | ANGGARAN      | REALISASI     | CAPAIAN (%)  | (6-9)             |
|    |                                          |                                          |         |           | (5/4) x 100% |               |               | (8/7) x 100% |                   |
| 1  | 2                                        | 3                                        | 4       | 5         | 6            | 7             | 8             | 9            | 10                |
|    | Meningkatnya omzet koperasi              | % Pertumbuhan omzet koperasi             | 8       | 7,72      | 96,5         | 905.574.000   | 871.745.925   | 96,3%        | 98,85             |
|    | Meningkatnya omzet Usaha Mikro           | % Pertumbuhan omzet Usaha Mikro          | 2       | 6,01      | 300,5        | 190.900.000   | 183.670.195   | 96,2%        | 99,80             |
|    | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan | % Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | 13,5    | 0         | 0            | 2.449.904.960 | 1.928.552.487 | 78,7%        | 0                 |
|    | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri    | % Kontribusi PDRB sub sektor industri    | 26,50   | 0         | 0            | 8.139.564.690 | 1.401.799.054 | 17,2%        | 0                 |

Analisa tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dan anggaran beserta faktor penyebab



### 3.4. Inovasi





dkupkabprobolinggo@gmail.com



dkupp.probolinggokab

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



dkupkabprobolinggo@gmail.com



dkupp.probolinggokab

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



## BAB. IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

Terdapat 4 Indikator Kinerja Utama dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Pada Tahun 2025. Adapun hasil capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya omzet koperasi. Dengan hasil capaian sebesar 96,5 dengan predikat baik
2. Meningkatnya omzet Usaha Mikro. Dengan hasil capaian sebesar 300,5 dengan sangat baik
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan (data belum rilis di BPS)
4. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri (data belum rilis di BPS)

Pencapaian diatas tidak luput pula dari hambatan / kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan.
- b. Kurang maksimalnya pemeliharaan, perbaikan / peningkatan infrastruktur /prasarana dan sarana umum.
- c. Kurang maksimalnya penguasaan, pemanfaatan & perbaikan/ peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama sehingga belum memberikan dampak yang maksimal.
- d. Terbatasnya fasilitasi kegiatan lelang, kontak bisnis, dan promosi pameran produk unggulan.



- e. Rendahnya kemampuan, kemauan, kreasi, inovasi sumber daya manusia yang terlibat dalam industri rumah tangga dan IKM sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar.
- f. Proses produksi IKM masih menggunakan sarana dan prasarana yang sederhana dan tradisional.
- g. Kurang menariknya insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para investor.
- h. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- a. Diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik.
- b. Perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur.
- c. Diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer.
- d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan lelang agribisnis, kontak bisnis, dan promosi.
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM pelaku IRT dan IKM dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya orientasi mutu.
- f. Memberikan bantuan stimulan sarana dan prasarana produksi.
- g. Kreatifitas insentif yang lebih baik dibanding Pemerintah Daerah yang lain, untuk selanjutnya dilakukan promosi yang efektif dalam menarik investor ke Kabupaten Probolinggo.
- h. Memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

## 5.2 Saran

Memperbaiki dan menyempurnakan Indikator-indikator dan Sasaran sehingga dapat merumuskan target-target yang akan dicapai disetiap bagian-bagian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-PD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Dan Transparansi Hasil Penyelenggaraan



Pemerintahan Dan Pelaksanaan Pembangunan Serta Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Pada Tahun 2025. Komitmen Kuat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik, Pembangunan Yang Berkesinambungan Baik Sdm, Sarana Dan Prasarana Akan Terus Ditingkatkan Pada Tahun - Tahun Mendatang Sehingga Tujuan Dan Kebijakan Pembangunan Dapat Diwujudkan.



## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TA. 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGENG WIYANTO, S.Sos., M.M.  
NIP. : 19690322 199703 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Probolinggo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. MOHAMMAD HARIS  
Jabatan : BUPATI PROBOLINGGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
BUPATI PROBOLINGGO



dr. MOHAMMAD HARIS

Probolinggo, 20 Oktober 2025  
Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN

SUGENG WIYANTO, S.Sos., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690322 199703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**APBDP TAHUN 2025**

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA                      | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP PD        | 1,30%  |
| 2.  | Meningkatnya omzet koperasi                         | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi  | 29%    |
| 3.  | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                      | Persentase pertumbuhan omzet UM        | 4,5%   |
| 4.  | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan            | Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | 13,5%  |
| 5.  | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri               | Kontribusi PDRB sub sektor industri    | 27%    |

**PROGRAM DAN ANGGARAN**  
**APBDP TAHUN 2025**

| NO. | PROGRAM                                                                  | ANGGARAN           | KETERANGAN (SUMBER DANA)     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Rp. 17.564.986.512 | DAU, SILPA, PAD, DBH, PBHPKB |
| 2.  | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                              | Rp. 49.007.500     | SILPA                        |
| 3.  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | Rp. 16.604.000     | SILPA                        |
| 4.  | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Rp. 770.330.750    | SILPA, PAD, DID FISKAL       |
| 5.  | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Rp. 69.631.750     | SILPA                        |
| 6.  | program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | Rp. 70.900.000     | DID FISKAL, DAU              |
| 7.  | Program Pengembangan UMKM                                                | Rp. 120.000.000    | DAU, SILPA                   |
| 8.  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             | Rp. 5.044.200      | SILPA                        |
| 9.  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Rp. 1.104.962.000  | DAU, PAD, SILPA              |
| 10. | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting      | Rp. 955.232.800    | DID FISKAL, SILPA            |

CS Dipindai dengan CamScanner



| NO. | PROGRAM                                                | ANGGARAN                  | KETERANGAN<br>(SUMBER DANA) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 11. | Program pengembangan ekspor                            | Rp. 13.484.960            | SILPA                       |
| 12. | Program standarisasi dan perlindungan konsumen         | Rp. 112.092.000           | SILPA                       |
| 13. | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri   | Rp. 259.089.000           | DAU, SILPA                  |
| 14. | Program perencanaan dan pembangunan industri           | Rp. 8.132.164.690         | DBHCHT                      |
| 15. | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional | Rp. 7.400.000             | SILPA                       |
|     | <b>Total</b>                                           | <b>Rp. 29.250.930.162</b> |                             |

Probolinggo, 20 Oktober 2025  
 KEPALA DINAS  
 KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN  
 DAN PERINDUSTRIAN

BUPATI PROBOLINGGO



dr. MOHAMMAD HARIS

SUGENG WIYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690322 199703 1 002

## DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| KINERJA UTAMA/<br>SASARAN STRATEGIS                       | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                    | PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN                                                                                                 | SUMBER<br>DATA           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Meningkatnya tata<br>kelola birokrasi<br>perangkat daerah | Persentase Kenaikan<br>LHE AKIP PD             | Penilaian dan analisis sistematis mengenai pencapaian kinerja serta pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban instansi Pemerintah.                                                                                                                         | $\frac{\text{Nilai sikap tahun } n}{\text{Nilai sikap tahun } n-1} \times 100$                                                   | LHE AKIP PD              |
| Meningkatnya omzet<br>koperasi                            | Persentase<br>Pertumbuhan omzet<br>koperasi    | Omzet adalah pendapatan secara keseluruhan yang telah perusahaan dapatkan dari hasil penjualan sebuah produk atau jasa pada periode tertentu. Jangka waktu ini mencakup periode hitungan per hari, per minggu, per bulan, hingga dengan hitungan tahun. | $\frac{\text{Omzet Koperasi tahun } N - \text{Omzet Koperasi tahun } N-1}{\text{Omzet Koperasi tahun } N-1} \times 100$          | ODS Koperasi             |
| Meningkatnya omzet<br>Usaha Mikro                         | Persentase<br>pertumbuhan omzet<br>Usaha Mikro | Omzet adalah pendapatan secara keseluruhan yang telah perusahaan dapatkan dari hasil penjualan sebuah produk atau jasa pada periode tertentu. Jangka waktu ini mencakup periode hitungan per hari, per minggu, per bulan, hingga dengan hitungan tahun. | $\frac{\text{Omzet Usaha Mikro tahun } N - \text{Omzet Usaha Mikro tahun } N-1}{\text{Omzet Usaha Mikro tahun } N-1} \times 100$ | Data Base<br>Usaha Mikro |
| Meningkatnya PDRB<br>Sub Sektor<br>Perdagangan            | Kontribusi PDRB sub<br>sektor perdagangan      | PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.                                                                                                          | $\frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100$                                          | BPS                      |
| Meningkatnya PDRB<br>Sub Sektor Industri                  | Kontribusi PDRB sub<br>sektor industri         | PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.                                                                                                          | $\frac{\text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100$                                             | BPS                      |

Mengetahui,  
KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO

  
**SUGENG WIYANTO, S.Sos., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690322 199703 1 002

CS Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TA. 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator                              | Target<br>Tahunan | Target Tribulan |       |       |       | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------|
|     |                                                     |                                        |                   | I               | II    | III   | IV    |            |
| 1   | Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah | Persentase Kenaikan LHE AKIP PD        | 1%                | 0,25%           | 0,25% | 0,25% | 0,25% |            |
| 2   | Meningkatnya omzet koperasi                         | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi  | 8%                | 2%              | 2%    | 2%    | 2%    |            |
| 3   | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                      | Persentase pertumbuhan omzet UM        | 2%                | 0,5%            | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  |            |
| 4   | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan            | Kontribusi PDRB sub sektor perdagangan | 13,5%             | 3,38%           | 3,38% | 3,38% | 3,38% |            |
| 5   | Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri               | Kontribusi PDRB sub sektor industri    | 27%               | 6,75%           | 6,75% | 6,75% | 6,75% |            |

CS Dipindai dengan CamScanner







## 2. Renaksi



Kabupaten Probolinggo  
Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

# RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

| NO  | TUJUAN                                                                    | SASARAN STRATEGIS                                                                                  | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                      | TARGET TAHUNAN  | PENTAHAPAN |       |       |       | ANGGARAN          | KETERANGAN                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                 | TW 1       | TW 2  | TW 3  | TW 4  |                   |                                                            |
| 1   | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan Kab Probolinggo | Meningkatnya Manajemen Energi Perangkat Daerah                                                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Nilai 82        |            |       | 78    |       |                   |                                                            |
|     |                                                                           | Meningkatnya smart koperasi                                                                        | Persentase Pertumbuhan omzet koperasi                                                                                                                                  | 29,0%           | 7,25       | 7,25  | 7,25  | 7,25  |                   |                                                            |
|     |                                                                           | Meningkatnya omzet Usaha Mikro                                                                     | Persentase pertumbuhan omzet Usaha Mikro                                                                                                                               | 4,5%            | 1,125      | 1,125 | 1,125 | 1,125 |                   |                                                            |
|     |                                                                           | Meningkatnya PORB Sub Sektor Perdagangan                                                           | Kontribusi PORB sub sektor perdagangan                                                                                                                                 | 15,50%          | 3,375      | 3,375 | 3,375 | 3,375 |                   |                                                            |
|     |                                                                           | Meningkatnya PORB Sub Sektor Industri                                                              | Kontribusi PORB sub sektor industri                                                                                                                                    | 27,0%           | 6,750      | 6,750 | 6,750 | 6,750 |                   |                                                            |
| NO. | URUSAN                                                                    | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                  | SASARAN                                                                                                                                                                | TARGET          | PENTAHAPAN |       |       |       | ANGGARAN          | KETERANGAN                                                 |
|     |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                 | TW 1       | TW 2  | TW 3  | TW 4  |                   |                                                            |
| 1   | Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                       | Nilai Setiap Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 78 Nilai        |            |       |       |       | 18.834.879,858,00 |                                                            |
|     |                                                                           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumenPerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu                                                                   | 21 Dokumen      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 139.451.499,00    |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 9 dokumen       | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 129.150.000,00    | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, RKA, DPA, RKB) |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 10.301.490,00     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAP), URPD, LKIP dll)  |
|     |                                                                           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan                                                                                                                | 19 Dokumen      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 14.854.769.566,00 |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 120 Orang/bulan | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 14.844.429.960,00 | Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 10 Laporan      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 10.311.800,00     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir           |
|     |                                                                           | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu                                                                            | 4 Dokumen       | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 4.106.000,00      |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan       | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 4.106.000,00      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|     |                                                                           | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu                                                                                              | 21 Dokumen      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 155.836.809,00    |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Pelaporan Penghasilan Retribusi Daerah                                                | Jumlah Laporan Penghasilan Retribusi Daerah                                                                                                                            | 19 Dokumen      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 155.830.800,00    | Jumlah Laporan Penghasilan Retribusi Daerah                |
|     |                                                                           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Persentase pemenuhan administrasi umum PD                                                                                                                              | 100%            | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 115.257.889,00    |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket        | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 115.257.880,00    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |
|     |                                                                           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | Persentase pemenuhan BMD yang sesuai dengan RPJMD                                                                                                                      | 50%             | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 231.365.389,00    |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 40 Unit         | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 231.365.380,00    | Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan     |
|     |                                                                           | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD                                                                                                                  | 12 laporan      |            |       |       |       | 3.981.893.792,00  |                                                            |
|     |                                                                           | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 laporan      | ✓          | ✓     | ✓     | ✓     | 99.852.324,00     | Pemenuhan Tagihan Internet, Listrik dan Air                |



| NO. | URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                                                                                         | SAGARAN                                                                                                                                                             | TARDET         | PENTAHAPAN |      |      |      | KETERANGAN       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|------|------|------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                | TW 1       | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                  |
|     |        | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Diusulkan                                                                                      | 12 laporan     | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 3.883.000,00     |
|     |        | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diusulkan                                                                                                 | 12 laporan     | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 2.095.356.400,00 |
|     |        | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                                                                                  | 150 Unit       | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 233.866.899,00   |
|     |        | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                              | 40 Unit        | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 117.826.000,00   |
|     |        | Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                   | 40 Unit        | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 20.500.000,00    |
|     |        | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      | 1 Unit         | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 94.940.000,00    |
|     |        | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                               | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan                                                                                                | 82%            | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 79.997.888,00    |
|     |        | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                  | Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa                                                                                                                      | 82%            | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 79.997.888,00    |
|     |        | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                   | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                           | 40 Unit Usaha  | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 34.997.000,00    |
|     |        | Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                     | 30 Unit Usaha  |            |      |      |      | 41.000.000,00    |
|     |        | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                              | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya                                                                                                              | 92%            | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 25.000.000,00    |
|     |        | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya                                                                                                          | 92%            | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 25.000.000,00    |
|     |        | Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                            | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                                                  | 30 Unit Usaha  | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 21.000.000,00    |
|     |        | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                              | Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapabilitas SDMnya                                                                                                      | 75%            |            |      |      |      | 128.969.899,00   |
|     |        | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan                                                                                              | 25%            | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 128.969.899,00   |
|     |        | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                              | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                  | 240 Orang      | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 128.969.899,00   |
|     |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                             | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya                                                                                                                  | 25%            |            |      |      |      | 115.708.000,00   |
|     |        | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Koperasi yang dibantu/dan dilindungi                                                                                                                         | 30 Unit Usaha  |            |      |      |      | 115.708.000,00   |
|     |        | Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 30 Unit Usaha  | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 115.708.000,00   |
|     |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                  | Persentase UUM yang meningkat omzetnya                                                                                                                              | 5%             | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 1.628.000.000,00 |
|     |        | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 500 Unit Usaha | ✓          | ✓    | ✓    | ✓    | 1.628.000.000,00 |



| NO. | URUSAN                          | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                   | TARGET          | PENTAHAPAN |      |      |      | ANALISISAN       | KETERANGAN                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                 | TH 1       | TH 2 | TH 3 | TH 4 |                  |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pembudayaan Melalui Kamtibmas Usaha Mikro                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kamtibmas Usaha Mikro                                                                                           | 100 Unit Usaha  | √          | √    | √    | √    | 0,00             | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro                                                                                        |
|     |                                 | Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Personan Usaha Mikro                                                                                                   | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                       | 7000 Unit Usaha | √          | √    | √    | √    | 20.000.000,00    | Pembudayaan Ketersediaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                               |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pembudayaan Ketersediaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menemuka Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                     | 100 Unit Usaha  |            |      |      |      | 0,00             |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Ketrampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan        | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Ketrampilan                                                                                          | 400 Orang       | √          | √    | √    | √    | 1.000.000.000,00 | 1. Pelatihan Ketrampilan dan Negosiasi Bisnis<br>2. Pelatihan Strategi Branding dan Marketing                                               |
|     |                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                               | Persentase usaha mikro yang meningkat Stata Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                     | 1 persentase    | √          | √    | √    | √    | 30.000.000,00    |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stata Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                          | Jumlah Usaha mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil                                                                                         | 1 Unit Usaha    | √          | √    | √    | √    | 30.000.000,00    |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                          | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                       | 85 Unit Usaha   | √          | √    | √    | √    | 30.000.000,00    | Pengembangan Produk dan Pengolahan (Pelatihan Olahan KripiK piang), Fasilitas Pemasaran berupa Event Pameran Harjakabpro                    |
| 2   | Pemerintahan Bidang Perdagangan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                            | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                                                                                                     | 20 persentase   |            | √    | √    |      | 10.000.000,00    |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Oudang                                                                                                                 | Jumlah Tanda Daftar Oudang yang direkomendasikan                                                                                                          | 5 Unit Usaha    |            | √    | √    |      | 10.000.000,00    |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Oudang                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Oudang                                                                                                                        | 5 Dokumen       |            | √    | √    |      | 10.000.000,00    | Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Oudang                                                                                                    |
|     |                                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                       | Persentase sarana distribusi perdagangan yang standar (SN)                                                                                                | 5,71%           | √          | √    | √    | √    | 2.044.075.000,00 |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                      | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direalisasi                                                                                                     | 5 Unit          | √          | √    | √    | √    | 1.929.075.000,00 |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                | 35 Unit         | √          | √    | √    | √    | 1.929.075.000,00 | 1. Pemeliharaan Halaman Gedung / Bangunan Kantor ( Pasar Wargal )<br>2. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Sarana Distribusi Perdagangan |
|     |                                 | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjaya                                                       | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pembudayaan                                                                | 35 pengelola    | √          | √    | √    | √    | 115.000.000,00   |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                            | 35 Dokumen      | √          | √    | √    | √    | 115.000.000,00   | Peningkatan Retribusi Pelayanan Pasar                                                                                                       |
|     |                                 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                     | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil                                                                                 | 81,11%          | √          | √    | √    | √    | 986.157.000,00   |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di kendalikan                                                                                       | 11 komoditas    | √          | √    | √    | √    | 986.157.000,00   |                                                                                                                                             |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 305 Laporan     | √          | √    | √    | √    | 21.000.000,00    | Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok                                                                                                     |



| NO. | URUSAN                          | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                                                                            | SASARAN                                                                                                                                           | TARDET          | PENTAHAPAN |      |      |      | ANDBAAN          | KETERANGAN                                                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                 | TW 1       | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                  |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                    | 5 Laporan       |            | √    | √    |      | 99.1.2.1.000.00  | Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi                              |
|     |                                 | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan                                                                                | 72 kali         | √          | √    | √    | √    | 30.000.000,00    |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                             | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                   | 72 Laporan      | √          | √    | √    | √    | 30.000.000,00    | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi           |
|     |                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                  | Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah                                                                  | 85,33%          | √          |      |      |      | 128.000.000,00   |                                                                 |
|     |                                 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi                                                                                    | 30 produk       |            | √    | √    | √    | 128.000.000,00   |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                        | 5 Pelaku Usaha  |            | √    | √    | √    | 95.000.000,00    | Kekutuberaan Pameran Dagang Tingkat Nasional                    |
|     |                                 | Sub Kegiatan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Mini Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                    | 13 Pelaku Usaha |            | √    | √    | √    | 25.000.000,00    | Kekutuberaan Pameran Dagang Tingkat Nasional                    |
|     |                                 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                               | Persentase alat-alat ukur, timbangan, dan perlengkapan lainnya (JTTT) yang bertanda tera sah yang berlaku                                         | 95%             | √          | √    | √    | √    | 191.000.000,00   |                                                                 |
|     |                                 | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                 | Persentase UTPP yang ditera dan tera ulang                                                                                                        | 90%             | √          | √    | √    | √    | 191.000.000,00   |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                            | Jumlah Alat Ukur, Alat Tera, Alat Timbangan, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                   | 10000 Unit      | √          | √    | √    | √    | 173.970.000,00   | Pelaksanaan Tera/Tera Ulang di 24 Kecamatan                     |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                         | 2030 Orang      | √          | √    | √    | √    | 37.030.000,00    | Pengawasan Metrologi Legal                                      |
|     |                                 | PROGRAM PENGOLOAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                          | Persentase produk unggulan daerah yang dipasarkan dan dipasarkan di dalam negeri                                                                  | 85,33%          | √          | √    | √    | √    | 28.000.000,00    |                                                                 |
|     |                                 | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                       | Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi                                                                                           | 30 produk       | √          | √    | √    | √    | 28.000.000,00    |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kerjasama dengan retail, marketplace, supermarket dan jasa akomodasi | 30 UMKM         | √          | √    | √    | √    | 20.000.000,00    | Ribah Uang Dekranasda dan Realisasi Kambaran dengan toko modern |
| 3   | Pemerintah Bidang Perindustrian | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                 | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah diadukan sebagai kebijakan                                                             | 90%             | √          | √    | √    | √    | 4.971.263.150,00 |                                                                 |
|     |                                 | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                 | Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan                                                                                   | 90%             | √          | √    | √    | √    | 4.971.263.150,00 |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                       | 1 Dokumen       |            |      |      |      | 0,00             |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaluran Industri                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaluran Industri               | 1 Dokumen       | √          | √    | √    | √    | 700.000.000,00   | Pembangunan KHT Tahap 4 dan Pengalokasian KHT                   |
|     |                                 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                   | 1 Dokumen       |            |      |      |      | 0                |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                          | 2 Dokumen       |            | √    | √    | √    | 1.10.000.000,00  | Pengelolaan KHT                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                   | 3 dokumen       | √          | √    | √    | √    | 4.191.263.150,00 | Bantuan Hibah Bantuan Alat kepada UKM                           |
|     |                                 | Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                      | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                  | 1 Dokumen       |            |      |      |      | 0                |                                                                 |
|     |                                 | Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah dokumen Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                                          | 4 Dokumen       |            |      |      |      | 0                |                                                                 |



| NO. | URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET        | PENTAHAPAN |      |      |      | ANALISAN          | KETERANGAN                                                                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | TW 1       | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                   |                                                                                       |
|     |        | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase izin Usaha Industri yang telah diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28%           |            | √    | √    |      | 6,00              |                                                                                       |
|     |        | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang direkomendasikan penerbitan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Unit Usaha |            | √    | √    |      | 6,00              |                                                                                       |
|     |        | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Dokumen    |            |      |      |      | 0,00              |                                                                                       |
|     |        | Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 30 Dokumen    |            |      |      |      | 0,00              |                                                                                       |
|     |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23%           |            | √    | √    |      | 58.000.000,00     |                                                                                       |
|     |        | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 | Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 Unit Usaha |            | √    | √    |      | 58.000.000,00     |                                                                                       |
|     |        | Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 Dokumen    |            |      |      |      | 0,00              |                                                                                       |
|     |        | Sub Kegiatan Osimnas, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Osimnas dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Dokumen     |            |      |      |      | 0,00              |                                                                                       |
|     |        | Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 Dokumen    |            | √    | √    |      | 50.000.000,00     | Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |      |      |      | 78.626.185.825,00 |                                                                                       |

